

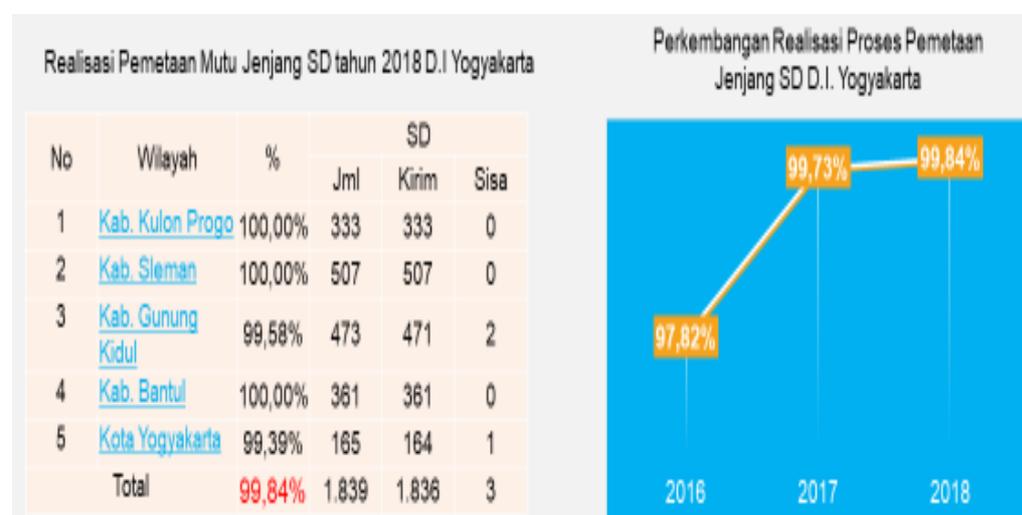
IKHTISAR EKSEKUTIF

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. LPMP menyelenggarakan fungsi pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

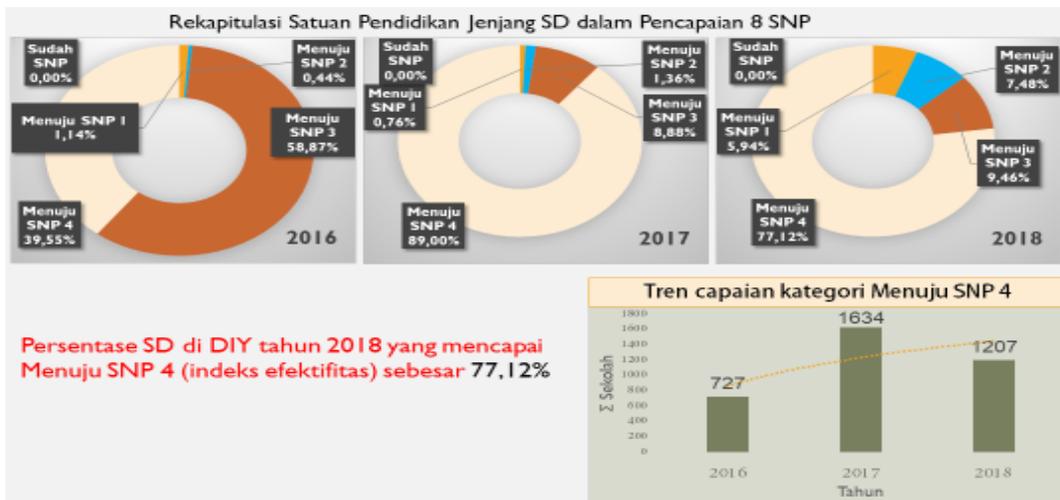
Tolok ukur kinerja LPMP adalah pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh satuan pendidikan pada wilayah masing-masing. Pengukuran capaian SNP dilakukan dengan kegiatan pemetaan mutu di semua jenjang. Sedangkan dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan dilakukan dengan kegiatan supervisi dan fasilitasi di satuan pendidikan.

Laporan kinerja LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja kegiatan sebagaimana di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan dalam Bab III. Secara umum capaian kinerja LPMP D.I Yogyakarta tahun 2018 sebagai berikut:

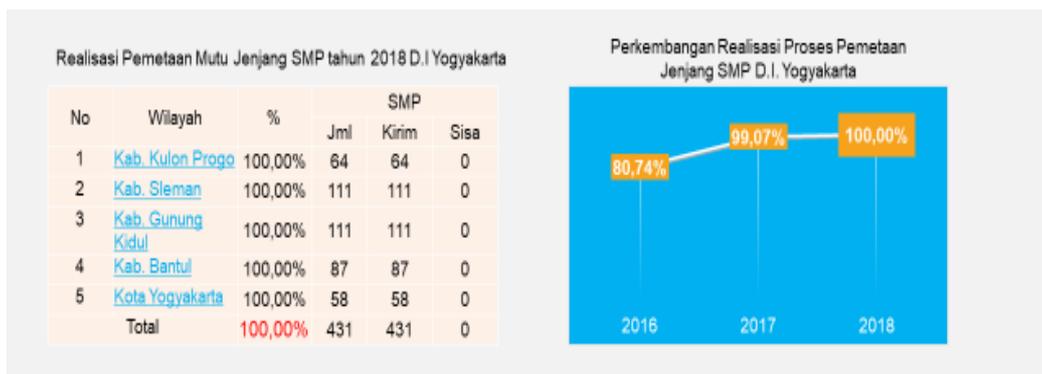
IKK1- Persentase SD yang telah dipetakan mutunya



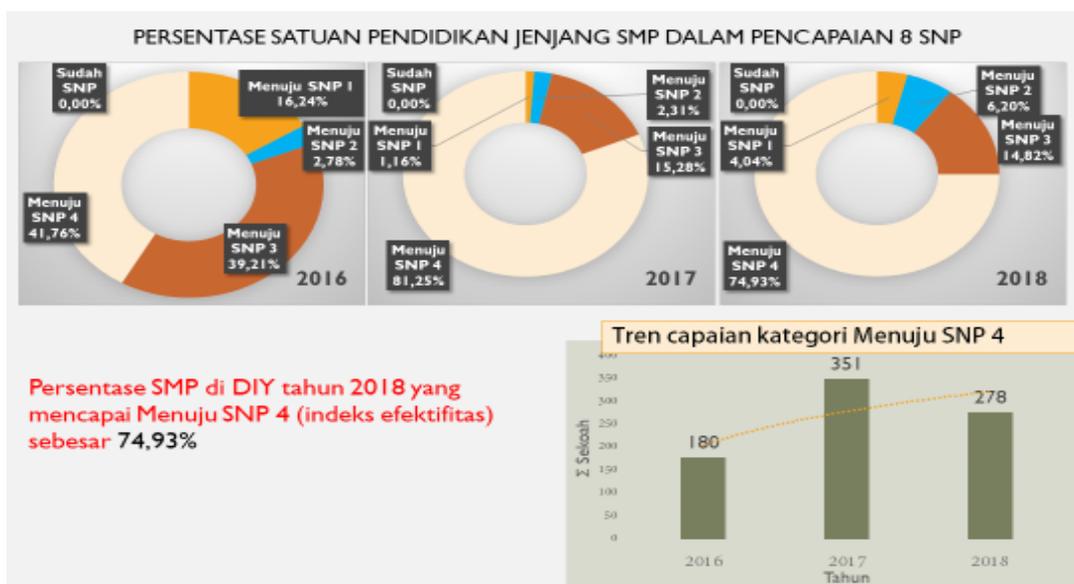
IKK2- Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya



IKK3- SMP yang telah dipetakan mutunya



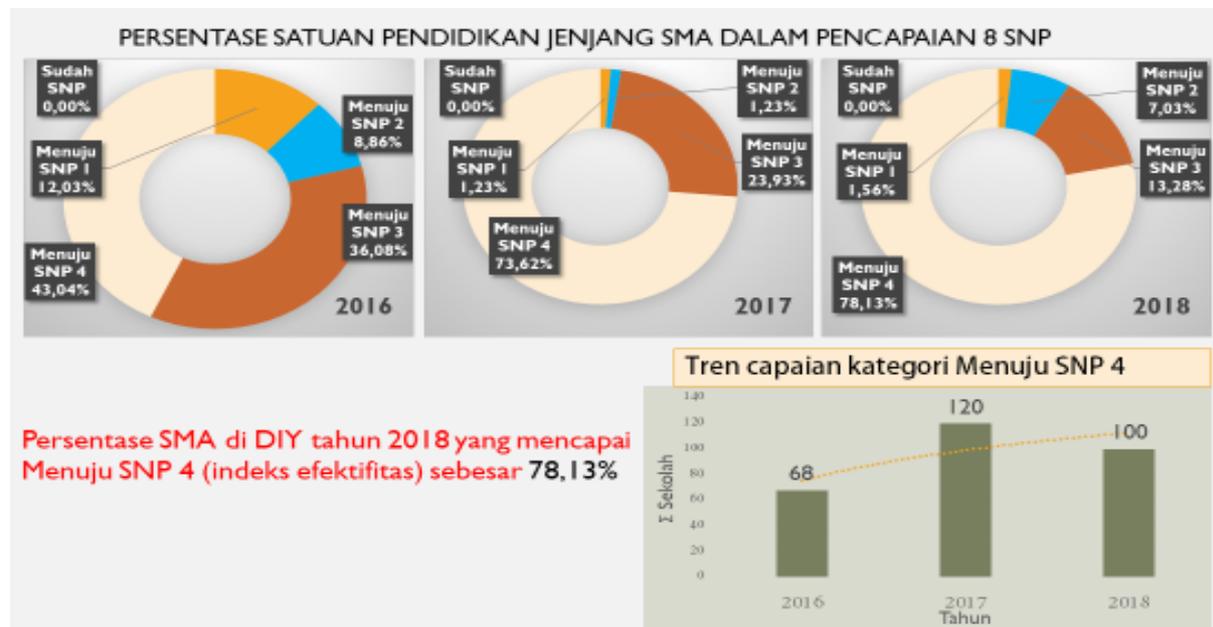
IKK4- Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya



IKK5- Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya



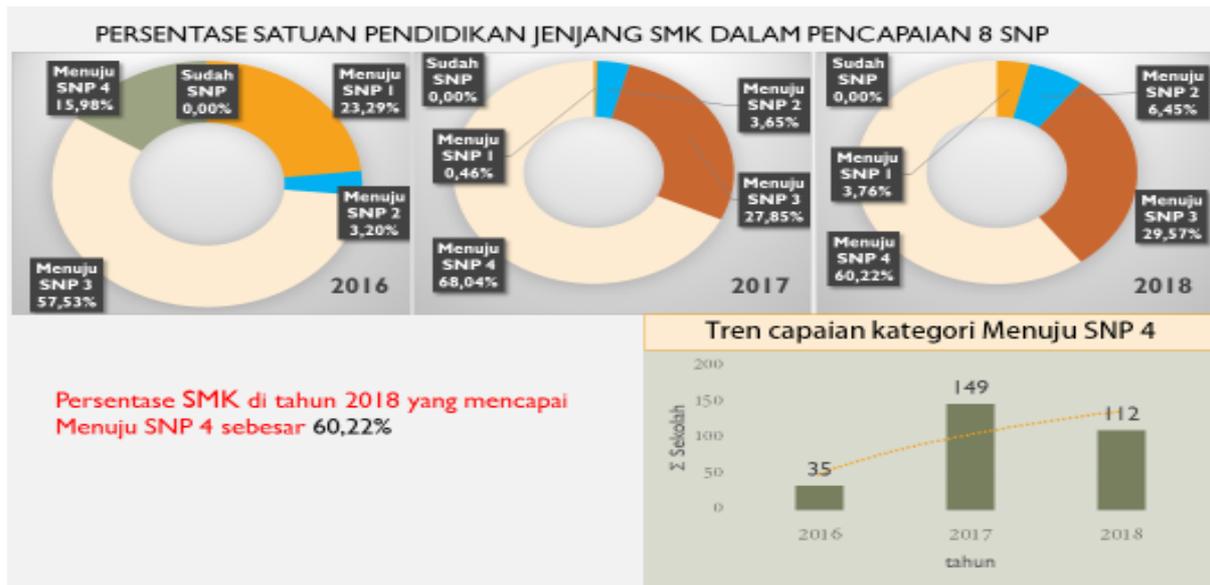
IKK6- Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya



IKK7- SMK yang telah dipetakan mutunya



IKK8- Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya



#IKK9- : SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

#IKK10-: SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

#IKK11-: SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

#IKK12- : SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH DISUPERVISI DAN DIFASILITASI DALAM PENCAPAIAN SNP MELALUI PELAKSANAAN KURIKULUM 2013

TAHUN	TIPE	SD		SMP		SMA		SMK		GRAND TOTAL		% KOMULATIF Σ SEK DIY: 2650
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH		
2015	MANDIRI	2	65	3	32	0	28	0	22	5	142	5,55%
	NON MANDIRI	63		29		28		22		142		
2016	MANDIRI	300	693	84	159	0	25	0	46	384	923	40,38%
	NON MANDIRI	393		75		25		46		539		
2017	MANDIRI	80	734	32	186	6	63	33	110	151	1093	81,62%
	NON MANDIRI	654		154		57		77		942		
TOTAL			149		377		116		178		2163	81,62%
			2									
REALISASI K-13 TAHUN 2018		SD	SMP	SMA	SMK	Σ TOTAL	KET					
		341	57	46	28	472						
Σ KOMULATIF K-13 s.d 2018		1833	434	162	206	2635						
Σ SEKOLAH DI DIY per 2018		1839	431	163	217	2650						
% KOMULATIF s.d 2018		99,67%	100,70%	99,39%	94,93%	99,43%						

SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH DISUPERVISI DAN DIFASILITASI DALAM PENCAPAIAN SNP SEBAGAI SEKOLAH MODEL

No	Tahun	JENJANG				JUMLAH	KETERANGAN
		SD	SMP	SMA	SMK		
1	2016	5	5	5	5	20	Σ Sekolah Model s.d. 2018 sejumlah 100 sekolah, dari 20 sekolah di tahun 2016 dan bertambah 80 sekolah pada 2017
2	2017	45	25	15	15	100	
3	2018	45	25	15	15	100	



IKK13: Data Pendidikan Dasar dan Menengah Akurat, Berkelanjutan, dan Terbaru

<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>

IKK14: Nilai Minimal SAKIP LPMP 75

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Sekolah yang melebur/*regrouping* dan sekolah yang tidak beroperasi akibat tidak ada siswa yang mendaftar, membuat target realisasi pemetaan kurang dari 100%. Hal ini terjadi merata pada semua jenjang.
2. Kompetensi personal operator khususnya jenjang SD belum merata, sehingga ada beberapa hambatan teknis dalam proses pemetaan.
3. Proses transformasi kearah peningkatan kualitas dan akuntabilitas data belum sepenuhnya disadari oleh responden pada semua jenjang, sehingga masih terdapat kasus responden yang belum peduli terhadap proses pengisian instrumen pemetaan.
4. Spesifikasi computer yang digunakan dalam proses pemetaan mutu khususnya pada jenjang SD belum sepenuhnya memenuhi persyaratan minimal.
5. Update software aplikasi PMP dan DAPODIK dilakukan selama proses pemetaan sehingga berefek pada semangat kinerja responden dan operator.
6. Jumlah pertanyaan pemetaan mutu yang banyak mempengaruhi psikologis maupun teknis pengisian instrumen responden.

7. Perubahan data sekolah yang tidak diikuti dengan updating yang secara aktual.
8. Proses pengolahan data di tingkat nasional yang memerlukan waktu berakibat pada publikasi hasil pemetaan mutu yang tertunda dari target.
9. Buku pedoman SPMP masih menimbulkan penerjemahan yang beragam dari sudut pandang yang berbeda. Ditambah kemampuan dan tingkat pemahaman materi yang beragam dari fasilitator menimbulkan mispersepsi akan pemahaman materi.
10. Pelaksanaan kegiatan SPMI yang melibatkan kolaborasi semua unsur di sekolah belum sepenuhnya terlaksana.
11. Kegiatan dan program yang dibebankan ke sekolah-sekolah baik dari kemdikbud maupun dari kementerian lain sering kali dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan *overlapping*. Hal ini membuat pencapaian target kurang optimal.
12. Terjadi sinkronisasi data kurikulum sebagai dampak perpindahan kewenangan penanggungjawab kegiatan di eselon I. dalam prosesnya terdapat beberapa sekolah target yang telah mendapatkan SK kurikulum yang berdampak sekolah tersebut dieliminir menjadi sekolah sasaran di tahun 2018.
13. Sinkronisasi data kurikulum yang belum sempurna menyebabkan beberapa sekolah yang menjadi target tidak terdata dalam sistem pendataan penanggungjawab kegiatan tingkat eselon I yaitu Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
14. Kolaborasi antar eselon dan perpindahan penanggungjawab beberapa tahap kegiatan memperpanjang proses birokrasi dan sinkronisasi. Hal ini mengakibatkan ada beberapa langkah kegiatan yang terabaikan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Update data sekolah yang bekerjasama dengan dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan minimal satu tahun sekali.
2. Proses komunikasi dengan pemangku kepentingan lebih diintegrasikan melalui rapat-rapat sekretariat.
3. Mempererat kemitraan dengan dinas kabupaten/kota diharapkan muncul kesadaran bahwa proses pemetaan menjadi kepentingan bersama.
4. Berkoordinasi dengan pusat dalam rangka mengkonsultasikan beberapa hambatan-hambatan teknis pelaksanaan pemetaan mutu.

5. Proses komunikasi antara fasilitator dengan satuan tugas penjaminan mutu lebih diintensifkan sehingga tidak terjadi multi tafsir terhadap dokumen-dokumen yang ada.
6. Mempererat kemitraan antara LPMP dengan dinas kabupaten/kota sehingga diharapkan mendorong proses implementasi SPMP yang berefek pada pengimbasan best practices yang dilakukan oleh sekolah model.
7. Meningkatkan dan menjaga proses dan kegiatan yang telah dijalankan.
8. Kolaborasi dan kerjasama antar satker (P4TK dan LPMP) lebih diintensifkan dalam upaya meminimalisasi target yang tidak tercover.
9. Pertukaran informasi antar satker pelaksana lebih intens dan sering dilakukan.